

## BAB VI

### PENUTUP

#### 6.1 Kesimpulan

Kerja sama kelautan Indonesia dengan Tiongkok dalam upaya mencegah *Illegal, Unregulated and Unreported (IUU) Fishing* Di laut Natuna Utara disebut dalam Kemitraan Strategis Komprehensif dengan Pemerintah Tiongkok pasal III.b yang ditanda tangani kedua negara pada tahun 2017. Kedua negara sepakat untuk bekerja sama dalam upaya memberantas kejahatan *IUU fishing* melalui beberapa cara seperti diplomasi maritim, implementasi ketentuan-ketentuan internasional seperti UNCLOS 1982, *FAO Compliance Agreement* 1993, serta pengembangan kapasitas.

Indonesia menegaskan posisinya sebagai negara kepulauan, memiliki hak berdaulat dan hak untuk memanfaatkan kekayaan lautnya berdasarkan peraturan yang ada di mata global. Dalam menanggapi isu *IUU fishing* yang terjadi di Laut Natuna Utara Indonesia memanfaatkan hubungan diplomatis baik itu secara bilateral, multilateral, dan regional. Terdapat banyak halangan dan rintangan bagi Indonesia untuk menangani *IUU fishing* yang terjadi di Laut Natuna Utara.

Kemitraan strategis antara Indonesia – Tiongkok membawa banyak potensi kearah positif, hanya saja pelaksanaan di lapangan tidak semudah yang di harapkan. Beberapa bidang kerja sama tidak dapat berjalan dengan baik karena adanya satu dan lain hal. Terdapat beberapa faktor yang membuat implementasi yang diharapkan tidak berjalan dengan baik sehingga kasus *IUU fishing* di Laut Natuna Utara masih terbilang tinggi.

Kerja sama yang dilakukan dalam tingkat diplomasi belum cukup membuahkan hasil. Terdapat beberapa cara diplomasi yang dilakukan Indonesia salah satunya adalah diplomasi maritim. Diplomasi maritim dipilih Indonesia sebagai instrument penyelesaian konflik untuk menghindari eskalasi konflik dari yang non militer menjadi konflik militer. Adanya klaim sepihak oleh Tiongkok juga menjadi salah satu faktor yang memberatkan kerja sama yang akan dilakukan.

Namun di sisi lain, diplomasi maritim terutama terhadap Tiongkok berguna untuk mengendalikan isu territorial yang ada. Dengan menjaga hubungan yang baik dengan Tiongkok dapat meminimalisir tindakan Tiongkok yang agresif di Kawasan Laut Natuna Utara, meskipun pada kenyataannya diplomasi yang dilakukan kemlu dengan melayangkan nota protes hingga pemanggilan dubes Tiongkok tidak memberi efek jera. Sisi positifnya, Tiongkok mulai tidak mempermasalahkan Kawasan Kepulauan Natuna dan menyatakan bahwa Tiongkok tidak mempermasalahkan kedaulatan Indonesia dan mengakui bahwa Natuna milik Indonesia.

Dalam tingkat regional, Indonesia juga aktif mempromosikan pentingnya mencegah dan memerangi *IUU Fishing*. Melalui forum-forum internasional contohnya AMF. Namun di ASEAN dapat dikatakan bahwa untuk mencapai Keputusan forum cukup sulit atau paling tidak sulit untuk dipraktikan dilapangan karena adanya perbedaan pandangan soal kasus yang ditangani. Vietnam sebagai salah satu negara yang sering melakukan tindakan *illegal fishing* di Laut Natuna Utara pernah menolak salah satu upaya AMF karena berdasarkan pandangannya putusan dalam forum tersebut dikhawatirkan mereka terhadap instrumen regional tersebut dapat berdampak negatif pada perekonomian negara mereka.

Tingkat pengawasan di Laut Natuna Utara juga dianggap masih belum cukup. Hal tersebut terbukti dengan tingginya kasus masuknya KIA ke Laut Natuna Utara. Pengawasan di Laut Natuna Utara sulit dilakukan karena minimnya armada kapal BAKAMLA beserta alutsistanya. Hingga tahun 2021 BAKAMLA hanya kapal bersenjata yang hanya mampu menembakan peluru kurang dari 1km serta jumlah kapal yang sedikit itu mengharuskan BAKAMLA menjaga kedaulatan laut Indonesia tidak hanya di Laut Natuna Utara saja.

## 6.2 Saran

### 6.2.3 Saran Praktis

Indonesia perlu mengontrol dan menunjuk satu Kementerian yang fokus dalam penanganan masalah *IUU fishing*. Terdapat beberapa bukti dari penelitian sebelumnya serta nota kesepahaman negara bahwa kasus ini setidaknya ditangani oleh 4 lembaga. Hal tersebut dapat menyebabkan

kesalahan dalam penyampaian informasi baik untuk pelaksanaan praktik di lapangan maupun untuk publik.

Berdasarkan opini yang diberikan oleh nelayan-nelayan Laut Natuna Utara melalui media berita Mongabay, peneliti menyimpulkan bahwa sangat penting untuk meningkatkan patroli dan pengamanan laut di Kawasan Laut Natuna Utara, rawannya konflik di Kawasan tersebut dan adanya tumpang tindih klaim ZEE membuat banyak KIA berani masuk atau melanggar batas wilayah Indonesia. Hal tersebut juga berdampak kepada sebagian nelayan di Laut Natuna Utara yang menjadi takut untuk melaut akibat kehadiran KIA yang sebagian dikawal oleh penjaga Pantai negaranya atau kapal nelayan tersebut multi fungsi sebagai kapal milisi militer. Dalam hal ini TNI AL dan BAKAMLA harus bekerja sama lebih baik lagi serta Pemerintah mengupayakan pengadaan teknologi baru baik untuk Keamanan maupun untuk nelayan.

Pengembangan kapasitas terutama dalam sektor pertahanan dan keamanan dengan Tiongkok harus lebih di perjelas arahnya. Selama kemitraan strategis komprehensif antara Indonesia dan Tiongkok di tanda tangani tahun 2017 dan berlangsung hingga 2021, pengembangan kapasitas dalam sektor pertahanan dan keamanan laut hanya terjadi 1 kali pada bulan Mei 2021. Selain itu pemerintah secara mandiri juga harus mengembangkan fasilitas pengelolaan ikan yang berada di Natuna, seperti cold storage ataupun teknologi untuk kapal nelayan lokal.

#### 6.2.2 Saran Akademis

Penulis menyarankan kepada peneliti selanjutnya apabila ingin mengangkat topik terkait *IUU fishing* dan kemitraan strategis komprehensif antara Indonesia dengan Tiongkok. Topik ini dapat memperbaiki peluang Indonesia dalam menangani dan memerangi *IUU fishing*. Diperlukan adanya pendekatan dan metode yang lebih baik lagi. Penentuan indikator juga diperlukan untuk meneliti tingkat keberhasilan kerja sama yang dilakukan

Selain tingkat keberhasilan, peneliti juga dapat meneliti faktor-faktor penyebab berhasil atau tidaknya Langkah-langkah yang dilakukan Indonesia dengan Tiongkok dalam memerangi *IUU Fishing* baik secara sosial, ekonomi,

politik, hingga militer. Perlu digaris bawahi bahwa *IUU Fishing* bukanlah sekedar isu yang hanya berdampak pada satu aspek seperti keamanan atau kedaulatan negara, *IUU Fishing* apabila dibiarkan atau tidak di tangani dengan baik dapat menyebabkan menurunnya perekonomian Indonesia, terganggunya kestabilan keamanan Indonesia hingga masalah-masalah sosial seperti krisis pangan dan ekonomi.